

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu hal penting yang harus dilakukan terutama bagi perusahaan yang telah menerbitkan saham kepada publik adalah melakukan pengungkapan informasi perusahaan secara terbuka. Alasan yang menjadikan pengungkapan informasi perusahaan itu penting adalah karena hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab manajemen terhadap para *stakeholder*, terutama dalam wujud praktik transparansi dan akuntabilitas perusahaan dan juga pengungkapan informasi perusahaan dapat digunakan *stakeholder* sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Bhuiyan dan Biswas (2007) memaparkan bahwa pengungkapan informasi tata kelola perusahaan yang cermat, transparan, dan tepat waktu, tentu akan berguna bagi manajemen untuk memperoleh keyakinan *stakeholder*. Sedangkan ketika perusahaan tidak melakukan pengungkapan yang memadai, hal tersebut berdampak pada keraguan *stakeholder*.

Istilah *good corporate governance* lahir pada tahun 1980-an di Amerika Serikat. Pada saat itu terjadi lonjakan ekonomi yang sangat besar yang mengakibatkan banyak perusahaan merebut kendali atas perusahaan lain yang tentu saja tindakan ini mendapatkan kecaman dari masyarakat dan publik. Tindakan perusahaan tersebut dinilai publik tidak etis. Publik menganggap bahwa manajemen dalam mengelola perusahaan tidak mementingkan kepentingan para *stakeholder*. Sejak saat itu perusahaan

dituntut untuk melakukan tata kelola yang baik dengan cara menjamin hak-hak para *stakeholder*. Konsep pemberdayaan *stakeholder* tersebut merupakan salah satu wacana dalam penegakkan prinsip *good corporate governance*. (Pratolo, 2015)

Awal mula paham mengenai *corporate governance* hanya berkembang di negara barat, seiring dengan berjalannya waktu paham tersebut mulai berkembang di negara lain termasuk Indonesia. Perhatian terhadap *corporate governance* diantaranya dipicu oleh kasus manipulasi dan kebangkrutan besar yang terjadi di dunia seperti kasus Tyco, Enron dan World. Kemudian kasus yang serupa yang terjadi di Indonesia adalah kasus Bank Century. Dari beberapa kasus tersebut hampir keseluruhan memiliki kesamaan yaitu manajemen tidak dapat menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik sehingga terjadi pemanipulasian oleh beberapa oknum. *Corporate governance* merupakan suatu hal yang harus manajemen lakukan dalam menjalankan aktifitas perusahaan agar masyarakat percaya bahwa manajemen dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam mengelola perusahaan.

Konsep *good corporate governance* pertama kali dikenal di Indonesia ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi nasional sebagai dampak dari krisis ekonomi asia yang berkepanjangan pada tahun 1997. Krisis tersebut dimulai dengan jatuhnya perekonomian Indonesia yang pada saat itu disebabkan oleh penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika. Selain dampak dari krisis ekonomi Asia, jatuhnya perekonomian Indonesia pada tahun tersebut juga dinilai karena banyak perusahaan tidak mematuhi

regulasi, yang mengakibatkan munculnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Dewasa ini dengan berkembangannya *good corporate governance* di dunia yang mengalami peningkatan yang cukup pesat, berbagai negara termasuk Indonesia mempunyai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas, untuk membentuk prinsip-prinsip *good corporate governance* dan mengawasi praktik penerapan prinsip tersebut dengan melihat situasi lingkungan bisnis masing-masing negara. *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) telah mengeluarkan beberapa prinsip dasar *good corporate governance* yang antara lain: *tranparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* (OECD, 1999). Kelima prinsip tersebut dirumuskan oleh OECD secara universal agar dapat dijadikan pedoman bagi semua negara dan perusahaan di dunia.

Pemerintahan Indonesia sendiri dalam upaya menerapkan *good corporate governance* telah melakukan beberapa usaha, di antaranya adalah membentuk suatu komite yaitu Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Komite tersebut bertugas untuk membantu serta sebagai pendorong penerapan prinsip *good corporate governance* di Indonesia. Pada tahun 2006 KNKG mengeluarkan pedoman umum *good corporate governance* Indonesia yang berisi mengenai prinsip-prinsip yang dijadikan landasan oleh perusahaan Indonesia dalam menjalankan kesinambungan usaha jangka panjangnya sesuai dengan koridor etika bisnis yang berlaku. Pedoman umum

tersebut juga merupakan penyempurnaan dari pedoman umum yang sebelumnya dikeluarkan pada tahun 2001.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan laporan tahunan perusahaan kepada BAPEPAM-LK yang diantaranya memuat secara lengkap uraian singkat mengenai penerapan tata kelola (*corporate governance*) yang perusahaan telah dan akan terapkan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir.

Lembaga lain yang bukan merupakan lembaga pemerintah turut serta membantu perkembangan mengenai pengimplementasian *good corporate governance* di Indonesia. *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) adalah sebuah lembaga non-pemerintah yang didirikan dengan tujuan sebagai pusat kajian pengembangan serta pembelajaran mengenai pengimplementasian tata kelola perusahaan serta menjadi lembaga yang membantu masyarakat dalam mewujudkan terciptanya perilaku bisnis yang sehat. Salah satu program yang dilakukan oleh IICG adalah menyelenggarakan program riset tahunan mengenai penerapan *good corporate governance* di Indonesia atau biasa disebut *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Program tersebut kemudian menghasilkan daftar

peringkat perusahaan dengan penerapan *good corporate governance* terbaik di Indonesia.

Di Asia Tenggara (ASEAN) sendiri terdapat lembaga yang mengeluarkan pedoman mengenai penilaian penerapan *good corporate governance*. *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF) merupakan suatu lembaga asosiasi otoritas pasar modal ASEAN yang beranggotakan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara tersebut kemudian sepakat untuk membuat suatu alat penilaian mengenai penerapan *good corporate governance* khususnya untuk wilayah ASEAN yaitu *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan informai perusahaan menghasilkan hasil yang cukup beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Labelle (2002), Suryono dan Prastiwi (2011), Hikmah dkk (2011), memperoleh hasil yang menjelaskan bahwa besar kecilnya perusahaan tentu dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate governance*. Perusahaan besar dianggap lebih mendapatkan tekanan dari publik untuk melakukan pengungkapan informasi sebagai suatu bentuk akuntabilitas perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Hossain dan Khan (2006), Sudarmadji dan Sularto (2007), penelitian tersebut memaparkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan *corporate governance*.

Variabel lain yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah variabel umur *listing*. Hikmah dkk (2011), Wardani (2012) memaparkan bahwa umur *listing* menjadi variabel yang berhasil mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Berbeda dengan penelitian lain yang menggunakan variabel tersebut, seperti yang dilakukan oleh Bhuiyan dan Biswas (2007), Rini (2010) menunjukkan hasil bahwa umur *listing* menjadi variabel yang tidak berhasil mempengaruhi luas pengungkapan informasi perusahaan. Umur *listing* merupakan umur perusahaan ketika telah terdaftar menjadi perusahaan publik. Perusahaan yang telah lebih lama menjadi perusahaan publik akan lebih mengetahui mengenai kebutuhan publik termasuk dalam pengungkapan informasi perusahaan.

Penelitian Labelle (2002), Haniffa dan Cooke (2002), Kusumawati (2006) memperoleh hasil bahwa tingkat struktur kepemilikan yang menyebar atau biasa disebut kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, hal itu disebabkan karena ketika perusahaan menerbitkan saham kepada publik, perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan informasi yang berguna untuk investor dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2001), Andersson dan Daoud (2005), bahwa struktur kepemilikan dispersi menjadi variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap praktik pengungkapan *corporate governance*.

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan memanfaatkan setiap sumber yang ada. Rasio yang

sering digunakan dalam menghitung profitabilitas perusahaan adalah *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), dan *net profit margin*. Perusahaan yang memiliki profit margin yang tinggi akan lebih melakukan pengungkapan informasi perusahaan secara lebih detail untuk memperoleh kepercayaan investor akan pencapaian manajemen dalam meningkatkan laba perusahaan (Shingvi & Desai, 1971). Teori tersebut didukung oleh penelitian Haniffa dan Cooke (2012), Almilia (2008), namun penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Retrinasari (2007), Hikmah dkk (2011) bertentangan dengan teori tersebut bahwa profitabilitas suatu perusahaan tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi perusahaan tersebut.

Dalam penelitian Sembiring (2005), Hikmah dkk (2011) menghasilkan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan maka perusahaan akan lebih luas mengungkapkan informasi yang publik perlukan, karena ketika ukuran dewan komisaris semakin besar maka pengawasan terhadap direksi pun semakin luas. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Rini (2010), Febrina dan Suaryana (2011) bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh pada luas pengungkapan informasi perusahaan.

Penelitian Almilia dan Retrinasari (2007), Sembiring 2012, Daniel (2013) memaparkan bahwa tingkat likuiditas perusahaan cenderung akan mempengaruhi perusahaan untuk semakin luas melakukan pengungkapan informasi dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan pihak eksternal. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Suryono dan Prastiwi (2011),

Wardani (2012) bahwa tingkat rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi perusahaan.

Tipe industri perusahaan diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu, *high profile* dan *low profile*. Perusahaan yang masuk dalam klasifikasi *high profile* akan cenderung lebih luas dalam mengungkapkan informasi perusahaan karena hal tersebut merupakan suatu wujud pertanggungjawaban perusahaan terhadap publik atas kegiatan bisnis perusahaan (Hasibuan, 2001). Penelitian Sembiring (2005), Anggraini (2006) menunjukkan hasil yang sama bahwa variabel tipe industri mempengaruhi luas pengungkapan informasi perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Labelle (2002), Kusumawati (2006) menunjukkan hasil yang bertentangan.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena terdapat ketidak konsistenan mengenai hasil penelitian. Penelitian ini mengacu pada penelitian Hikmah dkk (2011) yang meneliti mengenai faktor-faktor pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan perbankan, dengan variabel independen ukuran perusahaan, umur listing, kepemilikan dispersi, profitabilitas dan dewan komisaris. Pada penelitian ini peneliti menambahkan beberapa variabel yang berbeda, alasan penambahan variabel likuiditas dan tipe industri adalah karena pada penelitian lain yang menggunakan variabel tersebut terdapat hasil yang begitu tidak konsisten dan juga penambahan variabel ini disebabkan oleh sampel yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu hanya meneliti luas pengungkapan perusahaan perbankan, sehingga khususnya pada variabel tipe

industri tidak relevan digunakan pada penelitian sebelumnya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan daftar perusahaan yang masuk dalam 50 besar *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, alasan peneliti menggunakan sampel tersebut karena ke-50 perusahaan yang masuk dalam penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dianggap lebih berpengalaman dalam penerapan *good corporate governance* serta lebih berpengalaman dalam pengungkapan permasalahan tersebut sehingga sampel ini lebih relevan untuk diteliti. Kemudian untuk item pengungkapan dalam penelitian ini menggunakan index pengungkapan yang dikeluarkan oleh ACMF dalam pelaksanaan *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan usulan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Good Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris pada Top 50 Perusahaan Publik Indonesia yang Dikeluarkan ASEAN Capital Markets Forum dalam Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard periode 2014.”**

B. Batasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan informasi perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada variabel ukuran perusahaan, umur *listing*, kepemilikan dispersi, profitabilitas, dewan komisaris, likuiditas,

dan tipe industri. Alasan dibatasinya penelitian ini karena keterbatasan waktu dan agar peneliti dapat mencapai tujuan penelitiannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*?
2. Apakah umur *listing* berpengaruh terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*?
3. Apakah kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*?
5. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*?
6. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*?
7. Apakah tipe industri berpengaruh terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh antara:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*.
2. Pengaruh umur *listing* terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*.
3. Pengaruh kepemilikan dispersi terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*.
4. Pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*.
5. Pengaruh dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*.
6. Pengaruh likuiditas terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*.
7. Pengaruh tipe industri terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khusus di bidang ekonomi dan bisnis adalah menambah wawasan pembaca untuk lebih mengetahui perkembangan pengungkapan *good corporate governance* di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tersebut.

Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya untuk lebih mengembangkan pengungkapan corporate governance secara lebih luas

2. Manfaat Praktis

Hasil Manfaat yang dapat perusahaan ambil dari penelitian ini adalah sebagai acuan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan good corporate governance. Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk mendorong perusahaan Indonesia lebih mampu bersaing dengan perusahaan di ASEAN khususnya mengenai corporate governance. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh investor atau kreditor untuk memilih perusahaan mana yang layak untuk investasi

